

**UPAYA PEMERINTAH DESA TERHADAP PENINGKATAN  
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN  
(Studi Deskriptif Desa Bearanang Kecamatan Kutapanjang  
Kabupaten Gayo Lues)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**KURNIA  
NPM: 1303090055**

**Program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA  
MEDAN  
2017**

## **SURAT PERNYATAAN**

Dengan ini saya KURNIA, NPM : 1303090055 menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Saya yang menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk dilarang oleh undang-undang termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu, atau mempelagiat, memciplak dan mengambil karya orang lain adalah tindak kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, ciplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi berupa:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilainya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar sarjana yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan pemberian ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 13 April 2017  
yang menyatakan

**KURNIA**  
**NPM : 1303090055**

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya yang berjudul “Upaya Pemerintah Desa Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Studi Deskriptif Desa Beranang Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues”.

Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk melengkapi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis memperoleh bimbingan dan pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Teristimewa dan paling utama, kepada Ayahanda penulis Sabidin dan Ibunda tercinta Wan Kamsiah, kepada Abangda Marzuki, Mukhtar, kepada Paman Said Musa yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat dari awal sampai akhir kepada penulis.
2. Bapak Dr. Agussani, MAP, Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Drs. Tasrif Syam, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Drs. Arifin Saleh Siregar, M.SP selaku Ketua Program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Drs. Mohd. Yusri Isfa, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dengan perhatian dan kesabaran.
6. Bapak Mujahiddin, S.sos, M.SP selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan petunjuk dalam penulisan skripsi.
7. Bapak dan Ibu dosen dilingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Kawan-kawan seperjuangan di ilmu kesejahteraan sosial terkhusus kepada Rosyina Yuken Ilarika, Nica Cahyani, Ramadhani Syahfitri, Chairunnisa Nasution, Nirmala Sari, Liana Tivani, Ayu Cahyati, Amalia Syakinah Lubis, Mhd Syarif al Gazali Hrp, Muammar arbani Damanik, Wahyu Wardhanu, Ira Hariati Hasibuan, Agus Rianto, Ayu Pratiwi, Indah Juwita, Indah Maudi, Junaidi Syahputra, Muhammad Tosif, Amri, Sumianto, Haidul dan teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada Penulis.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati yang tulus, hanya Allah SWT yang dapat membalas apa yang diberikan kepada saya, dengan nilai ibadah, amin. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkaitan serta dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial.

*Wassalamu alaikum Wr. Wb*

Medan, 13 April 2017  
Penulis,

**KURNIA**  
**NPM : 1303090055**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II    URAIAN TEORITIS.....</b>	<b>12</b>
A. Uraian Teoritis .....	12
1. Partisipasi Masyarakat.....	12
a. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat .....	17
b. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat.....	19
c. Faktor Pendorong dan Penghambat Partisipasi Masyarat	19
B. Perencanaan.....	22
C. Pembanguna .....	23
D. Sistem Informasi .....	26
E. Sosialisasi.....	26
F. Media.....	27

G. Desa dan Pemerintahan Desa .....	27
1. Pengertian Desa .....	27
2. Karakteristik Desa .....	28
3. Pemerintahan Desa .....	29
4. Peranan Pemerintah Desa .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Jenis Penelitian .....	32
B. Kerangka Konsep .....	32
C. Definisi Konsep .....	33
D. Kategorisasi .....	34
1. Narasumber .....	35
2. Teknik Pengumpulan Data .....	35
3. Teknik Analisis Data .....	36
a. Reduksi Data .....	37
b. Triangulasi .....	37
c. Penarikan Kesimpulan .....	38
E. Lokasi dan Tempat Penelitian .....	38
<b>BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Penyajian Data .....	39
1. Penyajian Data Narasumber .....	39
B. Analisis Data dan Pembahasan .....	42
1. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa .....	42
2. Program Pembangunan dan Perencanaan Desa .....	45

3. Anggaran Dana Desa.....	49
4. Pengambilan Keputusan.....	51
5. Faktor-Faktor Kendala Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa .....	53
6. Tujuan Dari Pembangunan Desa.....	55
7. Solusi.....	58
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran.....	63

**DAFTAR PUSTAKA**



## **ABSTRAK**

### **UPAYA PEMERINTAH DESA TERHADAP PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN (Studi Deskriptif Desa Bearanang Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues)**

**KURNIA  
NPM : 1303090055**

Penelitian ini adalah penelitian tentang Upaya Pemerintah Desa Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (studi deskriptif Desa Beranang Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues). Dalam hal ini Desa harus mandiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004 yaitu Daerah bisa mandiri tidak lagi berharap dari pusat sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Dengan adanya kebijakan pemerintah Desa masyarakat menjadi lebih aktif berpartisipasi terhadap pembangunan Desa Beranang Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan, wawancara, menggambarkan keadaan penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Informen dalam penelitian ini sebanyak 13 orang. Hasil penelitian ini adalah upaya Pemerintah Desa terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Beranang Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues, perannya pemerintah Desa belum Maksimal. Hal ini dikarenakan pemerintah Desa belum mampu mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan di Desa Beranang.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada dasarnya pencapaian kesejahteraan masyarakat dilalu dengan jalan perubahan-perubahan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, perubahan tersebut dilakukan melalui pembangunan, tujuan pembangunan masyarakat ialah memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat, sehingga kemiskinan dan lingkungan hidup masyarakat mengalami perubahan. Pembangunan biasanya di definisikan sebagai rangkain usaha mewujudkan pertumbuhan secara terencana dan sadar yang di tempuh oleh suatu Negara atau Bangsa menuju modrnitas dalam rangka pembinaan Bangsa, misalnya pembangunan di bidang ekonomi, apabila pembanguan telah berjalan dengan baik maka pembangunan di bidang yang lain akan berjalan dengan baik.

Lahirnya undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Lembaran Negara No 125 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan langkah baru untuk membenahi penyelenggaraan pemerintah, melalui otonomi dan di sentralisasi yang di harapkan mampu melahirkan partisipasi aktif masyarakat dan menumbuhkan kemandirian Pemerinta Daerah.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintah juga harus ada sebab masyarakat adalah pemilik kedaulatan, masyarakat adalah pembayar pajak dan masyarakat adalah subjek dalam pembanguan. Selain itu, program-program yang di rumuskan dan dilaksanakan secara partisipasi turut memberikan

kesempatan secara langsung kepada masyarakat dalam perencanaan yang menyangkut kesejahteraan mereka dan melaksanakan sendiri serta memetik hasil program yang di capai. Dalam pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen proses pembangunan Desa, sehingga dengan adanya keterlibatan Pemerintahan Desa besar kemungkinan masyarakat akan merasa di beri peluang atau kesempatan ikut serta dalam pembangunan, karna pada dasarnya menggerakan partisipasi masyarakat Desa merupakan salah satu sasaran pembangunan itu sendiri.

Masyarakat sebagai objek pembangunan berarti masyarakat terkena langsung atas kebijakan dan kegiatan pembangunan. Dalam hal ini perlu ikut masyarakat dilibatkan baik dari segi formulasi kebijakan maupun aplikasi kebijakan tersebut, sebab merekalah yang dianggap lebih tahu kondisi lingkungannya. Dimana dominasi Negara menjadi Institut lokal, untuk itu peran serta langsung masyarakat sangat diperlukan dan terus diperkuat dan diperluas. Dengan demikian istilah partisipasi tidak sekedar menjadi retorika semata tetapi diaktualisasikan secara nyata dalam berbagai kegiatan dan pengambilan kebijakan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mutlak di perlukan, tanpa adanya partisipasi masyarakat pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat sebagai objek semata. Salah satu kritik adalah masyarakat merasa “tidak memiliki” dan ”acuh tak acuh” terhadap program pembangunan yang ada.

Kenyataan yang dihadapi pemerintah desa saat ini sebenarnya tidakhanya terletak pada kemampuan anggaran yang dimiliki untuk mengelolapemerintahan

dan pembangunan desa. Permasalahan yang dihadapi desasesejatinya sungguh sangat kompleks. Desa di negeri ini umumnya sangat dekat dengan keterbelakangan dan kemiskinan. Sumber dari segala persoalan ini adalah minimnya sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu menjalankan roda pemerintahan desa sesuai dengan asas-asas pemerintahan umum.

Untuk mewujudkan sistem pemerintahan desa yang baik pemerintah desa mempunyai tugas yang serius dalam menjalankan roda pemerintahan desa, baik dalam administrasi. Pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan sistem pemerintahan di dalam mewujudkan pemerintahan desa yang profesional. Oleh karena itu peranan kepala desa, tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa, dan partisipasi masyarakat dalam menjalankan dan mengawasi serta memberikan masukan dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sangat mempengaruhi tercapainya sistem pemerintahan desa yang baik dan benar.

Maka dari itu penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak diperlukan sehingga masyarakat akan dapat berperan serta secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi pembangunan, terlebih apabila kita akan melakukan pendekatan pembangunan dengan semangat kualitas. Masyarakat lokal menjadi bagian yang paling memahami keadaan Daerahnya tentu akan memberikan masukan yang sangat berharga. Masyarakat lokal dengan pengetahuan serta pengalamannya menjadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan. Masyarakat lokal lah yang mengetahui apa permasalahan yang dihadapi serta juga potensi yang dimiliki oleh daerahnya,

bahkan pola mereka akan mempunyai “pengetahuan lokal” untuk mengatasi yang dihadapi tersebut.

Partisipasi masyarakat memiliki banyak bentuk, mulai dari yang berupa keikutsertaan langsung masyarakat dalam program pemerintahan maupun yang sifatnya tidak langsung, seperti berupa sumbangan dana, tenaga, pikiran, maupun pendapat dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Namun demikian ragam dan kadar partisipasi seringkali di tentukan secara massa yakni dari banyaknya individu yang dilibatkan. Padahal partisipasi masyarakat pada hakikatnya akan berkaitan dengan akses masyarakat untuk memperoleh informasi, hingga saat ini partisipasi masyarakat masih belum menjadi kegiatan kegiatan tetap dan terlembaga khususnya dalam pembuatan keputusan. Sejauh ini, partisipasi masyarakat masih terbatas pada keikutsertaan dalam pelaksanaan program-program atau kegiatan pemerintah, padahal partisipasi masyarakat tidak hanya di perlukan pada saat pelaksanaan tapi juga mulai tahapan perencanaan bahkan pengambilan keputusan.

Keberhasilan penyelenggaraan Otonomi masyarakat Desa tidak terlepas dari partisipasi aktif anggota masyarakat. Di Desa telah di bentuk pemerintah Desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wujud dari demokrasi yang berfungsi sebagai lembaga legislatif Desa. Secara historis desa merupakan embrio bagi terbentuknya masyarakat poliyik dan pemerintahan di Indonesia. Jauh sebelum negara dan pemerintahan ini terbentuk, etnisitas sosial sejenis Desa atau masyarakat adat lain sebagainya, telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang penting. Mereka ini merupakan institusi yang otonom dengan tradisi,

adat istiadat dan hukum yang mengatur kuat, secara relatif mandiri dari campur tangan etensitas kekuasaan dari luar.(santoso:2003: 2).

Adanya kebijakan Otonomi Daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah unruk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri berdasarkan aspirasi yang berkembang pada masyarakat. Kebijakan tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam seluruh proses kebijakan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pengawasan. Untuk menunjukkan kegiatan pembangunan yang lebih baik demokrasi sebagai upaya dalam mendukung berjalannya roda Pemerintahan, Pemerintah pusat telah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk lebih menentukan nasib pembangunan Daerah Daerah itu sendiri melalui UU NO.32 Tahun 2004 Lembaran Negara No 125 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Maksud dan tujuan Undang-Undang tersebut adalah menciptakan pemerataan Pembangunan Nasional dalam mengatasi Kesenjangan antar Daerah, karena dengan Pembangunan Daerah itulah yang akan dapat menjangkau pelosok Negeri. Konsekuensi implementasi Otonomi Derah yang di amanatkan dalam UU NO.32 Tahun 2004 Lembaran Negara No 125 tahun 2004 Mengenai Pemerintah Desa, terdapat dalam pasal 206 yaitu mengenai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup Sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintah Desa yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa
2. Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota yang diserahkan pengaturannya pada Desa

3. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota
4. Urusan Pemerintah lainnya yang oleh peraturan Perundang-undangan diserahkan kepada Kepala Desa.

Kemudian dalam pasal 208 UU No. 32 Tahun 2004 Lembaran Negara No 125 Tahun 2004 terdapat tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan desa di atur lebih lanjut dengan peraturan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah. Maka Utama dari Undang-Undang ini dibagi desa adalah Pendudukan Desa tidak lagi dibawah Kecamatan. Desa adalah entitas yang otonom. Fungsi Kecamatan dalam konteks ini adalah sekedar menjalankan fungsi administratif dan koordinatif di wilayah Kecamatan, sesuai dengan status Kecamatan yang tidak lagi menjadi sebuah wilayah Kekuasaan melainkan sekedar sebagai perpajangan tangan dari Kabupaten. Pemerintah Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintah Daerah yang di lakukan oleh lembaga Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah Daerah yang dimaksud adalah termasuk didalamnya Pemerintah Desa.

Pemerintah Desa diharapkan mampu membentuk Daerah baik kemampuan ekonomi, potensi Daerah, Kependudukan, Sosial Politik maupun pertahanan dan Kecamatan. Disini jelas bahwa Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi Penyelenggaraan Otonomi Daerah perlu memperhatikan hubungan antar susunan Pemerintah dan Antar Pemerintah Daerah. Hakekat Otonomi Daerah adalah Efisiensi dan Efektivitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan, yang ada pada akhirnya bernuansa pada pemberian pelayanan kepada Masyarakat yang

hakekatnya semakin lama semakin baik, disamping untuk memberi peluang peran serta masyarakat dalam kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan secara luas dalam konteks Demokrasi yang bila dikaitkan Pemerintah Desa yang keberdayaanya adalah berhadapan langsung dengan Masyarakat.

Maka sejalan dengan Otonomi Daerah yang di maksud upaya untuk memberdayakan Pemerintah Desa harus di laksanakan, kerana posisi pemerintah yang paling dekat Masyarakat adalah Pemerintah Desa Peran Serta masyarakat dan partisipasinya Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemerintah Desa dari seluruh aspeknya, Tidak akan dapat berjalan secara Maksimal bila Pemerintahan Desa (Kepala Desa) sebagai orang yang terdepan dengan memiliki kewenangan untuk menggerakkan masyarakat sebagai Administrator Pembangunan bersifat Apatis atau acuh tak acuh terhadap kondisi Masyarakatnya dan Pemerintahanya maka yang terjadi adalah Kepakuman.

Dalam Undang – Undang No.32 Tahun 2004 Lembaran Negara No 125 Tahun 2004 yaitu pada pasal 208 “ Tugas dan kewajiban kepala Desa dalam memimpin Penyelenggaraan Pemerintah Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah berdasarkan peraturan Pemerintah” peraturan pemerintah tersebut terdapat dalam peraturan pemerintah No. 72 Tahun 2005 Lembaran Negara No 4587 Tentang Pemerintahan Desa yaitu pada pasal 8 yang isinya : Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan Pengaturanya kepada Desa sebagaimana yang di Maksud dalam pasal 7 huruf b adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat. Dari ketentuan diatas, kiranya dapat



disimpulkan bahwa Pemerintah desa yaitu Kepala desa adalah sebagai Administrator Pembanguna pada bidang Pemerintahan, administrator dalam bidang Kemasyarakatan, Administrator dalam bidang ekonomi, administrator dalam bidang Keamanan dan Ketertiban, Administrator dalam bidang hukum dan adat istiadat konsekuensi dari kenyataan Tersebut, pemerintah desa (Kepala Desa) harus mampu mengposisikan dirinya sebagai Pemimpin Masyarakat dalam berbagi Bidang pembangunan dengan tujuan memperbaiki kehidupan masyarakat.

Keadaan inilah yang terkadang kurang dipahami oleh Pemerintah Desa sehingga antara harapan Masyarakat dengan kenyataan yang dihadapi tidak pernah Bersentuhan, dengan kata lain antara ketentuan dengan rasa ego yang saling berhadapan hal yang menarik dan sejauh pengamatan penulis di Desa Beranang Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues terlihat bahwa Pemerintah Desa ( Kepala Desa) Belum maksimal melakukan Fungsi motivator sebagai pemerintah desa yakni Kepala desa sebagai Motivator Pemerintah tidak terwujud di tengah- tengah masyarakat.

Pelayanan akan kebutuhan masyarakat dalam bidang apapun tidak terpusatkan Kepada salah satu tempat strategis yang secara kusus sebagi tempat pelayanan. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang diatas, Penulisan melakukan Penelitian yang berjudul “Upaya pemerintah Desa Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan ( Studi diskriptif Desa Beranang Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues)”.

## **B. Rumusan masalah**

Rumusan masalah sangat penting agar diketahui arah jalannya suatu penelitian. Batasan masalah bukan batasan penelitian. Tidak jarang mahasiswa yang mencampurkan kedua jenis batasan tersebut ada yang menganggap sebagai dua hal tetapi sama ada juga yang menggunakan secara terbalik, batasan masalah merupakan pertanyaan penelitian yang akan dicari jawabannya melalui penelitian. Dengan makna tersebut maka batasan masalah sebenarnya adalah batas permasalahan (Arikunto, 2005: 14), berpangkal dari latar belakang masalah, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut “Bagaimanakah Upaya Pemerintah Desa Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan. (Study Deskriptif Desa Beranang Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues”.

## **C. Tujuan Penelitian**

Pada Setiap Penelitian yang akan dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak di capai juga bagaimana tentang apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya jelas diketahui sebelumnya. Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai untuk mengetahui bagaimana “Bagaimanakah Upaya Pemerintah Desa Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan. (Study Deskriptif Desa Beranang Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues”.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, berupa manfaatnya bagi kami sendiri maupun pihak lain yang berkepentingan dalam penelitian ini, adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik khususnya di bidang ilmu kesejahteraan sosial dalam menambah bahan kajian perbandingan bagi yang menggunakannya.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran mengenai permasalahan dan juga masukan bagi Pemerintah Desa dan Masyarakat di Kecamatan Kuta Panjang dalam melaksanakan Pembangunan.
3. Secara pribadi menambah wawasan pengetahuan peneliti tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Beranang Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues.

## **E. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN :**

Bab ini menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian.

### **BAB II URAIAN TEORITIS :**

Bab ini menguraikan Kumpulan Teori dari berbagai sumber-sumber referensi karya ilmiah.

### **BAB III METODE PENELITIAN :**

Bab ini menguraikan Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Defenisi Konsep, Kategorisasi, Informasi atau Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data dan Lokasi dan Waktu Penelitian.

### **BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN :**

Bab ini menguraikan Hasil Penelitian

### **BAB V PENUTUP :**

Bab ini menguraikan Kesimpulan dan Saran

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **A. Uraian Teoritis**

Uraian teori di tegakkan agar peneliti mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan sekedar perbuatan yang sifatnya coba-coba, adanya uraian teori merupakan cara yang ilmiah untuk mendapatkan data dan lain sebagainya, teori adalah seperangkat konsep, asumsi dan generalisasi yang dapat digunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan perilaku dalam berbagai organisasi. Berdasarkan rumusan di atas, penulis akan mengemukakan teori, gagasan, serta pendapat yang akan menjadi titik tolak landasan berfikir dalam penelitian ini yaitu:

##### **1. Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang secara sukarela tanpa dipaksa sebagaimana yang dijelaskan Sastropetro (1988:15) dalam Lugiarti (2004:19) bahwa partisipasi adalah keterlibatan kelompok untuk mencapai tujuan dan Menurut Mubyanto (1985:75) dalam Lugiarti (2004:26) partisipasi sebagai kesadaran untuk membantu berhasilnya setiap program dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Partisipasi sangat penting dalam pembangunan, karena pembangunan merupakan kegiatan berkesinambungan. Dalam pembangunan seperti itu sangat dibutuhkan pelibatan orang sebanyak mungkin. Sehingga tanpa partisipasi dari seluruh masyarakat pembangunan sukar dapat berjalan dengan baik.

Partisipasi merupakan masukan dalam proses pembanguna dan sekaligus menjadi keluaran dari pelaksanaan pembangunan, partisipasi dalam konteks pembangunan desa mencakup keikutsertaan warga dalam prose pengambilan keputusan dalam penerapan program yaitu adanya pembagian manfaat dari hasil pelaksanaan kegiatan atau keterlibatan warga dalam mengevaluasi kegiatan tersebut.konsep partisipai dimaksud menggambarkan tahapan partisipasi dalam proses pembangunan yaitu mencakup sebagai berikut:

- a. Tahap perencanaan
- b. Tahap pelaksanaan
- c. Tahap pemanfaatan
- d. Tahap penilaian hasil pembangunan.

Menurut Ndraha (1990:24) partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dapa dipilah sebagai berikut :

- a. Partisipasi melalui kontak dengan phak lain sebagai awal perubahan social
- b. Partisipasi dalam memperhatikan dan member tanggapan terhadap informasi baik dalam arti menerima, menerima dengan syarat maupun menolaknya.
- c. Partisipasi dalam perencanaan termasuk dalam pengambilan keputusan
- d. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional
- e. Partisipasi dalam menerima memelihara dan mengembalikan hasil pembangunan yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai tingkat

pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tingkatan hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Hal ini dapat menunjukkan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan, tidak terlepas dari hubungan dengan pihak lain dan penguasaan informasi sehingga dari hubungan dengan pihak lain penguasaan informasi, sehingga penting artinya sosialisasi dalam program yang berasal dari luar masyarakat.

Partisipasi dalam kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tindakan ikut mengambil bagian keikutsertaan mengambil bagian, atau ikut serta. menurut Juliantara (2004:84) partisipasi diartikan sebagai keterlibatan setiap warga Negara yang mempunyai hak dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun melalui intermediasi instansi yang mewakili kepentingannya, partisipasi masyarakat merupakan kebebasan berbicara dan berpartisipasi secara konstruktif. Di dalam suatu masyarakat yang sudah berkembang, maka tingkat partisipasi masyarakat tersebut cukup baik, tingkat ini tergantung dari kesadaran masyarakat adalah tanggung jawab pembangunan, rasa tanggung jawab dan kesadaran ini harus muncul apabila mereka dapat menyetujui suatu hal atau dapat menyerap suatu nilai. Untuk itulah diperlukan adanya perubahan sikap mental kerah yang lebih baik yang dapat mendukung pembangunan.

Menurut Adisasmita (2006:38) Partisipasi diartikan sebagai keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan peningkatan partisipasi masyarakat masyarakat tersebut merupakan salah satu bentuk

pemberdayaan masyarakat secara aktif yang berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat pedesaan secara lebih aktif dan efisien yaitu dalam hal ini sebagai berikut :

- a. Aspek masukan atau input (SDM, dana, peralatan/sarana, dan, rencana dan teknologi)
- b. Aspek proses (pelaksanaan, monitoring dan pengawasan)
- c. Aspek keluar atau output (pencapaian sasaran efektifitas dan efisiensi)

Partisipasi masyarakat telah sekian lama diperbincangkan dan didengarkandalam berbagi forum dan kesempatan. Intinya adalah agar masyarakat umum ikut serta dengan pemerintah memberikan bantuan guna meningkatkan, memperlancar, mempercepat, dan menjamin berhasilnya usaha pembangunan. Maka secara umum partisipasi dapat diartikan sebagai pengikutsertaan atau pengambilan bagian dalam kegiatan bersama. Menurut Dwipayana (2003:81) partisipasi masyarakat menyangkut duadimensi yakni keluar dan kedalam. Yang pertama menyangkut partisipasi yang melibatkan pemerintah itu sendiri dan kedua menyangkut partisipasi warga desa terhadap jalanya pemerintahan.

Partisipasi yang melibatkan adalah menyangkut seberapa besar keikutsertaan aparatur desa dalam pembangunan desa, hal ini dapat tercermin dapat penegakkan demokrasi, menjalin hubungan yang harmonis dengan lembaga adat ataupun agama yang ada pengelolaan konflik dan menciptakan masyarakat



yang mandiri serta menjalankan pemerintahan yang baik dan benar sesuai dengan koridor hukum dan peraturan yang berlaku. Didalam suatu masyarakat yang sudah berkembang maka tingkat partisipasi masyarakat tersebut boleh dikatakan cukup baik tingkat ini tergantung dari kesadaran masyarakat adalah tanggung jawab terhadap pembangunan rasa tanggung jawab dan kesadaran ini harus muncul apabila mereka dapat menyetujui suatu hal atau dapat menyerap suatu nilai. Untuk itulah diperlukan adanya perubahan sikap mental kearah yang lebih baik yang dapat mendukung pembangunan.

Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi akan memunculkan kemandirian masyarakat baik dalam bidang ekonomi, social, agama, dan adat budaya yang secara bertahap akan menimbulkan jati diri, harkat dan martabat masyarakat tersebut secara maksimal. Menurut Tjokromidjojo (Dalam safi'I 2007:104) partisipasi masyarakat dalam pembangunan dibagi atas tiga tahapan yaitu:

- a. Partisipasi dalam proses penentuan arah, strategi kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah.
- b. Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan
- c. Keterlibatan dalam memetik dan memanfaatkan pembangunan secara berkeadilan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan bagian integral yang harus ditumbuh kembangkan yang pada ahirnya akan menumbuhkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab, dari masyarakat secara sadar, bergairah dan

bertanggung jawab (Tjokromidjojo 2002:34) ada beberapa wadah bagi terwujudnya partisipasi masyarakat, antara lain sebagai berikut:

- a. Wadah partisipasi uah pikiranrapat yang dimaksud sperti rapat mingguan didesa, seminar, dan penataran.
- b. Wadah partisipasi tenaga, yang diberikan dalam perbaikan pembangunan agar partisipasi tenaga tersebut merupakan pendorong perlu di usahakan penertiban penjelasan tentang manfaat.
- c. Wadah partisipasi benda, dikalangan masyarakat masih hidup kesediaan memberikan harta benda terhadap uaha yang dirasakan meringankan beban hidup merekaseperti perbaikan kondisi jalan, sumbangan, ronda malam.
- d. Wadah partisipasi keterampilan didesa banyakk yang memiliki keterampilan, tetapi belakangan ini mengalami skil darin,karena merka telah mengalir ke kota.

**a. Faktor- Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat**

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi adanya tiga faktor utama yang mendukungnya. Menurut Slamet 1992 dalam Sumarjdo 2003 yaitu antara lain sebgai berikut:

- 1) Kemauan
- 2) Kemampuan
- 3) Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi

Ketiga faktor tersebut akan dipengarungi oleh beberapa faktor di seputar kehidupan manusia yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya seperti psikologi individu, pendidikan, adanya informasi, keterampilan, teknologi, kelembagaan yang mendukung structural dan stratifikasi social, budaya local serta peraturan pemerintah menurut openheim (1973 :21) dalam Sumardjo dan Saharuddin (2003:55) ada unsur yang mendukung untuk berperilaku tertentu pada diri seseorang dan yang memungkinkan terjaidinya perilaku tersebut.

Menurut Sahidu (1998:33) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemauan masyarakat untuk berpartisipasi adalah motif harapan, dan penegasan informasi. Faktor yang memberikan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi adalah pengaturan dan pelayanan kelembagaan struktur dan sertifikasi social, budaya local, kepemimpinan, sarana dan prasarana sedangkan faktor yang mendorong adalah pendidikan dan pengalaman yang memiliki.

Tiga prinsip dasar dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat desa agar ikut serta didalam pembangunan desa dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Learning process merupakan kegiatan dengan melakukan aktivitas proyek dan sekaligus mengamati, menganalisa kebutuhan dan keinginan masyarakat.
- 2) Institutional development merupakan melakukan kegiatan melalui pengembangan pranata social yang sudah ada dalam masyarakat karena institusi atau pranata social masyarakat mempunyai daya dukung social.

- 3) Participatory merupakan suatu pendekatan yang umum dilakukan untuk dapat mengenali need yang ada dalam masyarakat Marzal, 2003:20 dalam Sahidu 1998:52).

#### **b. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat**

Adapun bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang sudah ada di Desa Miteum yaitu:

1. Infrastruktur
  - a) Infrastruktur darat yaitu, seperti pembangunan jalan setapak pembangunan talut, gorong-gorong, pembangunan drainase dan lain-lain.
  - b) Infrastruktur laut yaitu, Seperti pembangunan jembatan tambatan prahu dan lain-lain.
2. Gotong royong, yaitu suatu partisipasi yang sifatnya masyarakat.

#### **c. Faktor Pendorong Dan Penghambat Partisipasi Masyarakat**

Ada beberapa faktor pendorong dan penghambat partisipasi masyarakat menurut (Tjokromidjojo, 2002:50) antara lain sebagai berikut:

- 1) Faktor pendorong partisipasi masyarakat:
  - a) Partisipasi dilakukan melalui usaha penerapan usaha demokrasi artinya masyarakat desa berikan kesempatan memilih dan memutuskan apa yang dikehendakinya baik antara alternative pemerintah maupun dari alternative masyarakat itu sendiri,

- b) Partisipasi itu dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat yang bersangkutan.
  - c) Partisipasi dilakukan melalui upaya perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
  - d) Setiap keputusan masyarakat, sepanjang mengenai kepentingan mereka harus dihormati dan di akui.
- 2) Faktor Penghambat partisipasi masyarakat
- a) Faktor ekonomi lapisan masyarakat setempat lebih mementingkan kebutuhan sehari-hari. Pada umumnya sebagian besar masyarakat memiliki pencaharian bertani, dengan bertani mereka merasa kebutuhan masih belum mencukupi sehingga, masyarakat menilai bahwa pembangunan merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah.
  - b) Pendidikan relative rendah dengan adanya tingkat pendidikan yang relative rendah menyebabkan seorang kurang mempunyai keahlian dan permasalahan yang dihadapi.
  - c) Terdapatnya kecendrungan kaum elit komunitas atas saja yang mampu dan berkesempatan untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan.

d) Dewasa ini pembangunan masyarakat lebih berbaur artinya pembangunan masyarakat dijadikan alat komunikasi politik dan symbol politik.

Partisipasi yang dilibatkan warga desa adalah menyangkut keikutsertaan yang berkaitan dengan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan yang dapat terlihat dari bentuk partisipasi masyarakat baik dari segi moral ataupun material, ikut menyambung ide-ide peduli terhadap pembuatan keputusan dan hasil keputusan, berperan aktif dalam kegiatan desa dan senantiasa pajak yang bergunan pendanaan pembangunan desa itu sendiri pada khususnya maupun untuk pembangunan Negara pada umumnya merupakan sedikit contoh bagaimana bentuk dari partisipasi masyarakat yang harus dilakukan.

Selanjutnya partisipasi masyarakat sering diabaikan dalam pengambilan keputusan. Hal ini disebabkan bahwa kebijakan yang diambil secara sepihak yaitu pemerintah itu sendiri baik dari level yang paling atas sampai ke level yang bawah. Pengambilan keputusan ini sering kali tidak melibatkan masyarakat desa sehingga pada tiap-tiap desa untuk wilayah tertentu akan sulit menerjemahkan kebijakan yang ada karena tidak sesuai dengan kondisi maupun keinginan masyarakat setempat. Kebijakan ini sangat tergantung pada yang menentukannya serta diimplementasikan agar masyarakat dapat membangun opini dan menentukan berpihak publik.

Maka diperlukan suatu mekanisme yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Hidayat (2004:74) membuat strategi perencanaan bersama

masyarakat yaitu melalui serangkaian aktifitas perencanaan bersama masyarakat berusaha menguatkan kapasitas masyarakat sekaligus mengupayakan kerja sama yang lebih erat antar berbagai pelaku pembangunan dan dalam pengambilan kebijakan yang benar-benar dibutuhkan daerah.

Strategi perencanaan masyarakat dilakukan untuk menjadikan suatu pelayanan dasar yang tersedia dan bagian yang menyatu dalam pengelolaan pembangunan daerah di era ini. Tujuannya yaitu mengurangi berbagai hambatan, mendorong masyarakat dan aparat pemerintah secara bersama-sama untuk mencapai jalan keluar dari berbagai masalah yang mereka hadapi. Untuk itu keterlibatan antara kedua pihak ini dalam pembangunan sangatlah dibutuhkan guna kemajuan bersama sebagai bentuk orientasi dari pembangunan. Dengan demikian penulis akan menekankan sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam berbagai kebijakan yang ada di desa tersebut baik partisipasi yang berbentuk materi yang merupakan partisipasi paling konkret dalam pembangunan sangatlah dibutuhkan guna kemajuan bersama sebagai motivasi guna pembangunan yang berkelanjutan.

## **B. Perencanaan**

Menurut Siagian (2004:108), perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan Tjokroamidjojo (2004:12) mengatakan bahwa perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses

mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

### **C. Pembangunan**

Dharmawan (2002:13) mengungkapkan pembangunan sebagai sebuah pergeseran yang berjalan secara gradual dan tak berulang yang didalamnya diisi oleh usaha-usaha atau realisasi atas rencana-rencana yang di buat secara rinci dan mencakup tema-tema penting kehidupan sebagai pokok perubahan dan pertumbuhan atau perbaikan. Dari konsep pembangunan tersebut setidaknya terdapat beberapa unsur penting yang sekaligus merupakan prasyarat suatu aktifitas agar dapat dikatakan sebagai sebuah pembangunan, yaitu :

- a. Pembangunan sebagai sebuah pergeseran yang berjalan secara gradual dan tak berulang, setidaknya mengandung makna bahwa pembangunan memiliki dinamika dari suatu rangkaian proses yang sistematis.
- b. Pembangunan memuat atau berisikan usaha-usaha atau realisasi atas rencana yang dibuat secara rinci, dalam hal ini pernyataan dimaksud sangat terkait dengan aktifitas eksplorasi, identifikasi dan klasifikasi atas berbagai masalah dan potensi pembangunan.
- c. Bahwa pembangunan mencakup tema-tema penting kehidupan sebagai pokok perubahan dan pertumbuhan atau perbaikan, artinya pembangunan termotivasi atas usaha untuk memenuhi kebutuhan strategis manusia yang bersifat prioritas.



Konsep pembangunan tersebut dalam konteks perkembangan masyarakat dapat dicermati sebagai sesuau proses perencanaan pembangunan partisipatif yang mengakomodasi aspirasi masyarakat, berdasarkan potensi sumberdaya yang ada untuk memenuhi kebutuhan prioritas dalam rangka kesejahteraan masyarakat.

Dijelaskan dalam UU No.32 Tahun 2004 Lembaran Negara No 125 Tahun 2004 pembangunan harus memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa, aktivitas dan meningkatkan peran serta masyarakat.selanjutnya apabila konsep pembangunan desa dengan memberdayakan masyarakat tersebut diarahkan untuk upaya pembangunan masyarakat, maka setidaknya terdapat beberapa prinsip pokok pengembangan masyarakat yang perlu diperhatikan. Menurut Dharmawan (2002:14) prinsip pokok pengembangan masyarakat dimaksud meliputi:

- a. Amelioration, adalah semangat memperbaiki keadaan komunitas sehingga hari esok lebih baik dari pada hari kemarin.
- b. Voluntarism, adalah prinsip kesukarelaan dan keswadayaan, artinya inisiatif-inisiatif pengembangan komunitas harus menghargai motivasi dari bawah. Mengaikan prinsip ini maka perencanaan pembangunan akan erjebak kembali kepada pemaksaan.
- c. Working eith, prinsip ini menghargai anggota komunitas local sebagai pihak yang memiliki status sejajar dengan pihak siapapun juga.
- d. Translation of commitment to community in the form of community service. Pihak luar menempatkan diri sebagai pelayan dengan semangat pengorbanan demi kemajuan komunitas local.

- e. Sustainability, prinsip ini di turunkan dari ideology sustainabilitas dalam pembangunan berkelanjutan.

Secara umum, kata pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warga negaranya (Budiman. 1995:1). Menurut Suroto, pembangunan adalah usaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Guna penetapan tujuan dan sasaran pembangunan pada tiap tahap, untuk alokasi sumber-sumber serta untuk mengatasi rintangan keterbatasan dan pertentangan ini dan untuk melakukan koordinasi kegiatan, diperlukan kebijaksanaan yang memuat program dan cara-cara yang relevan dan efektif yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan.

Menurut Suroto (1983:78) pembangunan adalah sebagai suatu peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan. Mempunyai beberapa implikasi tertentu. Pertama berarti memberikan perhatian terhadap kapasitas, terhadap apa diperlukan terhadap apa yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan tenaga guna untuk membuat perubahan. Kedua, ia mencakup keadilan (equity).

Perhatian yang berat sebelah kepada kelompok tertentu akan memecah belah masyarakat dan mengurangi kapasitasnya, ketiga penumbuhan kuasa dan wewenang dalam pengertian bahwa hanya jika masyarakat mempunyai kuasa dan manfaat tertentu maka mereka akan menerima manfaat pembangunan dan pada akhirnya pembangunan berarti perhatian yang sungguh-sungguh terhadap saling ketergantungan di dunia serta perlunya menjamin bahwa masa depan ditunjang kelangsungannya. Ktaren (2008:37) Memberikan definisi tentang pembangunan

secara sederhana yaitu pembangunan sebagai suatu perubahan tingkat kesejateraan secara terukur dan alami.

#### **D. Sistem Informasi**

Pengertian Sistem informasi adalah suatu himpunan komponen yang terpadu dan sistematis maupun formal yang mendukung ataupun melakukan fungsi operasi, manajemen dan menyajikan informasi guna menunjang manajemen sebagaimana yang diinginkan dan Menurut Jogiyanto HM menyatakan bahwa “ Sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan yang diperlukan. ”(Jogiyanto HM, Analisa dan Desain Sistem Informasi, Yogyakarta, 1999:11).

#### **E. Sosialisasi**

Brim (dalam Brice, 1994) mendefinisikan sosialisasi sebagai proses dimana seseorang memperoleh pengetahuan, kemampuan dan dasar yang membuat mereka mampu atau tidak mampu menjadi anggota dari suatu kelompok. Pengertian ini memandang sosialisasi sebagai suatu proses belajar dimana individu belajar dan mendapatkan nilai dari kelompok-kelompok yang dimasukinya. Pengertian tersebut juga sejalan dengan pengertian dari Zigler dan Child (dalam Brice, 1994) yang menyatakan bahwa sosialisasi adalah keseluruhan proses dimana individu mengembangkan, melalui proses transaksi dengan orang

lain, bentuk-bentuk khusus dari perilaku dan pengalaman yang berhubungan dengan sosialnya.

## **F. Media**

Social media adalah media online yang mendukung interaksi sosial. Social media menggunakan teknologi berbasisweb yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa situs media sosial yang populer sekarang ini antara lain: Blog, Twitter, Facebook dan Wikipedia. Definisi lain dari social media juga di jelaskan oleh Antony Mayfield (2008). Menurutnya social media adalah media dimana penggunanya dengan mudah berpartisipasi di dalamnya, berbagi dan menciptakan pesan, termasuk blog, jejaring sosial, wiki/ensiklopedia online, forum-forum maya, termasuk virtual worlds(dengan avatar/karakter3D).

## **G. Desa dan Pemerintahan Desa**

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan jauh sebelum negara Indonesia terbentuk. Menurut Wahjudin Sumpeno (2004). Sejarah perkembangan desa Indonesia telah mengalami perjalanan yang sangat panjang, bahkan lebih tua dari Republik Indonesia sendiri.

### **1. Pengertian Desa**

Istilah desa berasal dari bahasa India swadesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan hidup dengan kesatuan norma serla memiliki batas yang jelas (Yayuk dan

Mangkau, 2003). Istilah desa dan pedesaan sering di kaitkan dengan pengertian rural dan village yang di bandingkan dengan kota (city/town) dan perkotaan (urban). Konsep berdasarkan dan perkotaan mengacu pada karakteristik masyarakat, sedangkan desa merujuk pada suatu wilayah administrasi atau teritorial, dalam hal ini pedesaan mencakup beberapa desa (Antounio T, 2003). Definisi tentang desa sendiri samapai sekarang masih perlu dikaji karna batasannya menjadi perdebatan panjang dikalangan para ahli. Desa dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat di daerah satu dengan daerah lain berbeda budayanya.

## **2. Karakteristik Pedesaan.**

Dalam beberapa kajian dibedakan antara masyarakat kota (urban community) dan desa (rural community) berdasarkan letak geografis, kebiasaan dan karakteristik keduanya. Menurut Roucek dan Warren (1962), masyarakat desa memiliki karakteristik sebagai berikut.

- 1) Peran kelompok primer sangat besar
- 2) Faktor geografis sangat menentukan pembentukan kelompok masyarakat
- 3) Hubungan lebih bersifat intim dan awat
- 4) Struktur masyarakat bersifat homogen
- 5) Tingkat mobilitas rendah
- 6) Keluarga lebih ditekan kepada fungsinya sebagai unit ekonomi
- 7) Proporsi jumlah anak cukup besar dalam struktur kependudukan.

Sorokin dan Zimerrman dalam T.L Smith dan P.E Zop (1970) mengemukakan sejumlah faktor yang menjadi dasar dalam menentukan karakteristik desa dan kota, yaitu; mata pencarian, ukuran komunitas tingkat kepadatan penduduk, lingkungan, diferensiasi sosial, stratifikasi sosial, intraksi sosial dan solidaritas sosial.

### **3. Pemerintah Desa**

Dalam UU RI Nomor 22 Tahun 1999, desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

### **4. Peranan Pemerintah Desa**

Peranan bersala dari peran.Peran memiliki yaitu seperti tingkat tingkat diharapkan yang di miliki oleh yang berkendudukan di masyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari peran utama yang harus dilaksanakan(kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989:260). Menurut soekanto(1990:268) peranan meliputi norma yang di hubungkan dengan posisi seorang dalam masyarakat sebagai rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan sosial. Artinya adalah posisi yang di miliki seseorang tersebut seperti kepala desa yang merupakan pemerintah desa. Dengan posisi tersebut pemerintah desa akan lebih memiliki wewenang untuk menegakkan peraturan-peraturan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pemerintah desa merupakan unsur penyelenggara pemerintah Desa, Menurut Nurcholis (2005: 138) pemerintah desa mempunyai tugas antara lain

melaksanakan dan menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah kabupaten. Dari tugas pokok tersebut lahir fungsi pemerintah desa yang berhubungan langsung dengan situasi sosial dengan kehidupan masyarakat. Fungsi Pemerintah desa merupakan gejala sosial karena harus diwujudkan dalam interaksi antar individu dalam situasi sosial suatu kelompok masyarakat. (Rivai 2004:53) fungsi pemerintah desa yaitu pemerintah desa secara operasional dibedakan dalam fungsi pokok sebagai berikut :

- 1) Fungsi instruktif yaitu satu arah, pemerintah sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, dan dimana pemerintah itu kerjakan,
- 2) Fungsi konsultatif yaitu dua arah, hal tersebut digunakan sebagai usaha bentuk penetapan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan.
- 3) Fungsi partisipatif yaitu menjalankan pemerintahan desa berusaha mengaktifkan masyarakat baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun melaksanakannya.
- 4) Fungsi delegasi yaitu memberikan persetujuan wewenang atau menetapkan baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan pemerintah.
- 5) Fungsi pengendalian yaitu kepemimpinan harus mampu mengantar aktifitas anggotanya secara terarah terkoordinasi, sehingga dapat bekerja secara maksimal.

Berdasarkan pasal 14 dan 15 peraturan pemerintah no 72 tahun 2005 bahwa pemerintah desa mempunyai tugas penyelenggaraan urusan pemerintah pembangunan dan kemasyarakatan maksud adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, kerja sama antar desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas kepala desa mempunyai wewenang antara lain:

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan.
- 2) Mengajukan rancangan pengaturan desa
- 3) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB desa untuk dibalasan dan ditetapkan bersama BPD
- 5) Membina desa kehidupan masyarakat desa
- 6) Membina perekonomian desa
- 7) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- 8) Mewakili desa didalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjukan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang undangan.



## **BAB III**

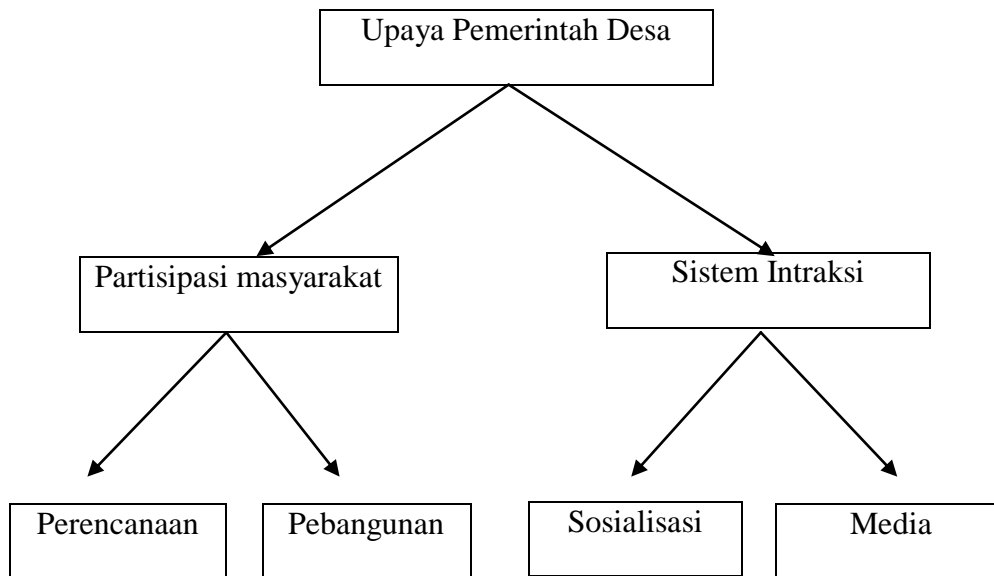
### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Diskriptif dengan Analis Kualitatif sebagaimana prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Menurut Meolog (2006: 5) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau kelompok orang. Oleh karena itu penelitian ini akan menggambarkan tentang strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berdasarkan fakta- fakta yang ada dan mencoba menganalisa kebenarannya berdasarkan data yang di peroleh.

#### **B. Kerangka Konsep**

Kerangka konsep adalah hasil pemikiran yang bersifat kritis dalam memperkirakan kemungkinan hasil peneliti yang akan dicapai. Menurut Nawawi (2001:40) adanya kerangka konsep yang menuntun penelitian pada rumus hipotesis. Dalam penelitian, seorang peneliti menggunakan istilah yang khusus untuk menggambarkan secara fenomena yang ditelitinya. Inilah yang disebut dengan konsep yakni istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan abstrak.



**Gambar 2.1 Kerangka Konsep**

### C. Definisi Konsep

Dalam penelitian untuk menggambarkan secara tepat fenomena yang hendak diteliti. Menurut Irwan (dalam bagong suryanto,200:49) konsep adalah makna yang berada didalam pikiran atau kat-kata. Konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang mejadi pusat perhatian dalam ilmu sosial (Sigaribun, 1995:33). Dalam penelitian yang menjadi definisi konsep adalah:

1. Partisipasi masyarakat merupakan ikut serta dalam melakukan kegiatan misalnya gotong royong.
2. Perencanaan merupakan suatu gagasan yang akan di wujudkan dalam bentuk nyata sesuai dengan ketentuan yang di sepakati

3. Pembangunan merupakan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan suatu proses yang saling terkait antara ekonomi, perubahan sosial, dan demokrasi politik.
4. Sistem intraksi adalah hubungan yang saling ketergantungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok.
5. Sosialisasi merupakan gagasan atau ide yang ingin di capai secara bersama demi kepentingan bersama.
6. Peralatan merupakan kelengkapan fasilitas untuk kepentingan pembangunan.

#### **D. Katagorisasi**

Dari beberapa uraian di atas, maka perlu kita ketahui pemikiran atau konsepsi pemikiran untuk memudahkan penelitian. Adapun kategorisasi sebagai berikut:

**Tabel:4.1**

<b>Katagorisasi</b>	<b>Indikator</b>
1. Upaya pemerintah Desa terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Desa Beranang Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues	a. Partisipasi masyarakat. b. Perencanaan. c. Pembangunan. d. Sistem informasi e. Sosialisasi f. Media.

<p>2. Bagaimana peran Pemerintah Desa dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan</p>	
--	--

### 1. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini 13 orang, diantaranya sebagai berikut:

- a. Kepala Desa Beranang.
- b. Kepala Dusun Dalam 3 Dusun, yaitu Kepala Dusun Belah toa, Kepala Dusun Belah Uken, Kepala Dusun Belah patung.
- c. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Adat.
- d. Masyarakat 6 orang.

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Ali(2001:1998) teknik pengumpulan data yang tepat untuk mendapatkan data kualitatif. Untuk memperoleh informasi dan data sebagai bahan penelitian ini. Untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan dalam penelitian ini, maka penulis sangat membutuhkan data-data yang relevan. Dengan demikian maka dalam upaya yang di perlukan tersebut tersebut, penulisan menggunakan dua jenis data yakni data sekunder dan data pelimer.

Data sekunder anantara lain sebagai berikut:

- a. Study kepustakaan(library reseach), yaitu penelitian yang akan di lakuakn denagan dukungan reverensi para ahli yand di kutip dari

buku-buku yang bebobot ilmiah yang berhubungan dengan variabel yang diteliti.

Sebagai data pelimer antara lain sebagai berikut:

- a. Study lapangan(feld research), yaitu aktivitas penelitian untuk mencari data-data lengkap dan akurat yang berkaiatan dengan judul yang di teliti. Penelitian lapangan yang penulis lakukan adalah terjun langsung pada sasaran penelitian yang dijadikan pembahasan.
- b. Observasi/pengamatan, dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian mengenai gejala, pritiwa, dan situasu yang berhubungan langsung dengan masalah penelitian. Menurut Moelog(2006:175) pengamatan mengoptimalkan kemampuan penelitian dari segi motif,kepercayaan,perhatian, prilaku tidak sadar, kebiasaan dan sebagainya.
- c. Wawancara, kegiatan ini mendapatkan data dan informasi secara tatap muka dengan responden atau informan tentang permasalahan yang di teliti. Menurut Moelog(2006:5) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu di lakukan dengan memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

### **3. Teknik Analisis Data**

Adapun teknik anlisis data dalam penulisan ini adalah Upaya Pemerintah Desa Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Study Diskriptif Desa Beranang Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues), yaitu analisis data kulitatif adalah mendeskripsiskan fenomena, mengklarifikasiakan,

dan melihat konsep-konsep yang muncul itu satu dengan yang lainnya berkaitan. Sebelum dianalisis data-data yang peneliti peroleh dalam penelitian terlebih dahulu diklarifikasikan sesuai dengan jenisnya sehingga dapat data-data yang benar-benar lengkap sesuai dengan tujuan dan fokus penelitian. Kesimpulan yang diambil dari hasil analisis data menggunakan metode induktif.

#### **a. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi.

#### **b. Triangulasi**

Selain menggunakan reduksi data peneliti juga harus menggunakan teknik Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Di mana dalam penegertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Meoloeng, 2004:330).

Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda (Nasution, 2003:115) yaitu wawancara, observasi, dan dokumen. Triangulasi ini memperkaya data. Menurut Nasution. Selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat efektif.

### **c. penarikan kesimpulan**

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid saat ini, peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang kredibel. Peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan pola berfikir edukatif, yaitu metode berpikir yang pergi dari fakta-fakta atau peristiwa khusus kemudian ditarik generalisasi yang memiliki sifat umum.

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Dari pemulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.

### **E. Lokasi dan Tempat Penelitian.**

Tempat lokasi penelitian yang akan dilakukan adalah sesuai dengan judul penelitian yakni di Desa Beranang Kecamatan Kutapanajang Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh.

## **BAB IV**

### **ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Bab ini menguraikan dan menyajikan data yang di peroleh dari nara sumber yang telah di tentukan sehingga memberikan jawaban yang jelas tentang peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, Desa beranang Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues.

#### **A. Penyajian Data**

Berdasarkan data yang telah di peroleh dari observasi dan wawancara dari narasumber penelitian, maka data tersebut akan di deskripsikan sehingga masalah penelitian tetang peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa beranang Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues. Untuk mendukung perolehan data selain data skunder maka data primer sangat membantu menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan tingkat karakteristik jawaban para narasumber. Selanjutnya hasil wawancara akan di uraikan secara sistematis sesuai dengan sifat metode penelitian deskriptif kualitatif.

##### **1. Penyajian Data Narasumber**

###### **a. Distribusi narasumber menurut jenis kelamin**

Berdasarkan jenis kelamin, narasumber dengan jenis kelamin laki-laki dan narasumber dengan jenis kelamin perempuan. Pada tabel berikut di jelaskan frekuwensi untuk masing-masing katagorisasi tersebut.



**Tabel 4.1****Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis kelamin	Frekuensi
1.	Laki-laki	11 orang
2.	Perempuan	2 orang
	Jumlah	13 orang

*Sumber desa berana hasil wawancara pada bulan februari 2017*

Berdasarkan tabel 4.1 yang tercermin di atas dapat dilihat bahwa narasumber berasal dari jenis kelamin laki-laki dengan frekuensi sebanyak 11 orang, dan sisanya berasal dari responden perempuan sebanyak 2 orang.

b. Distribusi narasumber berdasarkan pendidikan

Berdasarkan dari tingkat pendidikan, narasumber di kelompokkan menjadi tiga klasifikasi bidang pendidikan yaitu, tingkat SD, tingkat Smp, tingkat Sma pada tabel 4.2 berikut ini di sajikan untuk masing-masing dari kategorisasi tersebut.

**Tabel 4.2****Distribusi Narasumber Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi
1.	SMA	4 orang
2.	SMP	2 orang
3.	SD	7 orang
	Jumlah	13 orang

*Sumber data desa beranang hasil wawancara pada bulan februari 2017*

Berdasarkan hasil tabel 4.2 diatas dapat disimpulkan bahwa narasumber yang memiliki tingkat SD adalah 7 orang sedangkan SMP adalah 2 orang dan SMA 4 orang. Maka mayoritas narasumber dalam penelitian ini adalah yang memiliki tingkat pendidikan SD sebanyak 7 orang.

c. Distribusi narasumber berdasarkan jabatan /pekerjaan

Berdasarkan dari tingkat jabatan atau pekerjaan di Desa beranang Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues narasumber di kelompokan dengan katagori yaitu kepala desa, kepala dusun, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat. Pada tabel 4.3 ini kita akan melihat frekuwensi untuk masing-masing katagori tersebut menurut pekerjaan atau jabatan yang dimiliki pada peserta wawancara.

**Tabel 4.3**

**Distribusi narasumber berdasarkan pekerjaan/jabatan**

No	Jenis pekerjaan/jabatan	Frekuensi
1.	Kepala desa	1 orang
2.	Kepala dusun	3 orang
3.	Tokoh Agama	1 orang
4.	Tokoh Adat	1 orang
5.	Tokoh masyarakat	1 orang
6.	Masyarakat	6 orang
	Jumlah	13 orang

*Sumber data desa beranang hasil wawancara pada bulan february 2017*

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat disimpulkan bahwa frekuensi jumlah narasumber berdasarkan jenis pekerjaan/jabatan adalah masyarakat 6 orang, kepala dusun 3 orang, tokoh agama 1 orang, tokoh adat 1 orang tokoh masyarakat 6 orang dan kepala desa 1 orang.

## **B. Analisis Data dan Pembahasan**

### **1. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa**

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Kepala Desa Beranang pada tanggal 16 februari 2017 jam 8 sampai selesai dia mengatakan bahwa “ menurut saya masyarakat kurang ikut serta dalam berpartisipasi, di karenakan lebih mementingkan usaha pribadi.

Selanjutnya 17 februari 2017 jam 8 sampai selesai saya mewawancarai Kepala Dusun Toa dia mengatakan bahwa “menurut saya masyarakat kurang ikut serta berpartisipasi, karna sebagian masyarakat kurang mau tau tentang apa yang akan dilaksanakan misalnya gotong royong. Masyarakat banyak memiliki rencana yang akan dibangun namun masyarakat tidak mau ikut berpartisipasi contoh dalam pembukaan jalan baru kekebun, memperbaiki jembatan jalan dan membiarkan air bersih yang terbuang begitu saja. Beberapa yang sudah di bangun di Desa Beranang ini contohnya jalan menuju pemakaman, paud dan dibukanya jalan baru ke kebun namu belum masimal.

Selanjutnya 18 februari 2017 jam 9 sampai dengan selesai saya mewawancarai Kepala Dusun Belah Uken ”menurut saya masyarakat tidak mau kompak dalam melakukan pembangunan demi kesejahteraan bersama padahal

kalau masyarakat mau kompak kesejahtraan di Desa Beranang ini pasti akan sangat terasa, kita lihat saja contohnya ada masyarakat yang tidak mau ikut serta dalam gotong royong, tidak mau kumpul dana demi kepentingan bersama.

Selanjutnya 18 februari 2017 jam 4 sampai dengan selesai saya mewawancarai Kepala Dusun Belah Patung “menurut saya banyak dari masyarakat menginginkan kesejahtraan bersama namun mereka lebih memikirkan hasil akhirnya tanpa mau ikut serta dalam berpartisipasi, adapun perencanaannya contohnya masyarakat menginginkan jalan lingkar dibangun tapi sebagian masyarakat tidak ikut serta dalam melaksanakan pembangunan.

Selanjutnya 19 februari 2017 jam 8 sampai dengan selesai saya mewawancarai Tokoh Agama dia mengatakan bahwa “menurut saya partisipasi dalam pembangunan di Desa Beranang ini masih perlu adanya bimbingan sumber daya manusianya supaya masyarakat sadar kesejahtraan dibidang infrastruktur itu sangatlah penting, kita senang jalan ke pemakaman sekarang sudah lebih baik dari sebelumnya.

Selanjutnya 19 februari 2017 jam 2 sampai dengan selesai saya mewawancarai Tokoh Adat “menurut saya banyak masyarakat ikut berpartisipasi namun tidak melakukan kegiatan dengan maksimal dan sebagian dari masyarakat ada yang duluan pulang ketika gotong-royong masih akan dilanjutkan, dan kita lihat juga para remajanya hubungan sosialisasi antara sesama masih ada sebagian yang kurang terbuka kadang kita sering ingin mengadakan kegiatan untuk tarian adat (tari saman) tapi masyarakat tidak mau ikut partisipasi untuk pengumpulan dana sehingga seni budaya yang akan diadakan jadinya batal”

Selanjutnya 20 februari 2017 jam 10 sampai dengan selesai saya mewawancarai Toko masyarakat “menurut saya masyarakat susah untuk berpartisipasi apalagi misalnya dalam pengumpulan dana untuk kepentingan bersama, selain itu juga masyarakat didalam melakuakn kegitan ada yang sebagian yang tidak kompak”. Selanjutnya 21 februari 2017 jam 8 samapai selesai saya mewawancarai salah satu masyarakat “baik saya menagatahui ada beberapa infastruktur di Desa Beranag ini yang sudah dibangun misalnya pembangunan jalan,paret, jembatan, sekolah paud. Tapi sayangnya banyak masyarakat yangng tidak mau menjaga dengan baik misal contohnya kebersihan paret yang sudah dibangun”.

Selanjutnya 22 februari 2017 jam 9 sampai dengan selesai saya mewawancarai salah satu masyarakat Desa Beranang “saya selalu mengatakan masyarakat akan terus-terusan tidak mau kompak dalam berpartisipasi kecuali masyarakat yang diberi uapah, lain lagi masyarakat yang tempat tinggalnya diperkebuanan mereka kadang juga ketinggalan informasi, kedepan saya selalu berharap supaya masyarakat tidak mementingkan usaha sendiri saja masyarkat harus ikut partisipasi apalagi demi kesejahraan bersama”.

Selanjutnya 22 februari 2017 jam 11 sampai dengan selesai saya mewawancarai satu masyarakat “sakap pemerintah desa harus harus lebih ditingkatkan lagi supaya didalam melakukan kegiatan sosalsiai masyarakat terbuka, informasi harus lebih diperluas lagi agar partisipasi masyarakat meningkat lagi kedepanya, sejauh ini saya masih melihat masyarakata kurang ikut serta dalam berpartisipasi”.

Selanjutnya pada 22 februari 2017 jam 2 sampai dengan selesai saya mewawancarai lagi masyarakat Desa Beranang “kita melihat dulu dibandingkan sekarang, sekarang masyarakat sudah lebih maju walaupun sebagian masyarakat ada yang kurang mau ikut berpartisipasi, saya yakin kedepannya kegiatan sosialisasi kita pasti akan lebih meningkat lagi, lebih terbuka lihat saja perkembangan infrastruktur yang sudah di bangun di Desa Beranang ini”.

Selanjutnya pada 22 februari 2017 jam 3 sampai dengan selesai saya mewawancarai masyarakat “dalam hal pembangunan di Desa Beranang ini kebanyakan dari masyarakat selalu anggap sepele dengan pelaksanaan pembangunan yang akan di bangun sehingga pembanguan tidak masimal, banyak yang berfikir bahwa infrastrukur pembanguan di Desa Beranang ini tidak akan terlaksanakan karna masyarakat yang tidak mau kompak partisipasi”.

Selanjutnya pada 23 februari 2017 jam 8 sampai selesai saya mewawancarai masyarakat mengatakan bahwa “ saya melihat masyarakat yang tempat tinggalnya diladang banyak yang tidak ikut dalam berpartisipasi”.

## 2. Program Pembangunan dan Perencanaan Desa.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan kepala Desa Beranang pada 16 februari 2017 jam 8 sampai dengan selesai “perogram pembangunan di Desa Beranang ini memiliki berbagai bentuk ada yang bersifat swadaya masyarakat seperti (gotong royong) dan ada juga dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dan Anggaran Dana Desa (ADD). Sekarang dari swadaya masyarakat sekarang mulai tidak ada, akan tetapi kalau dari anggaran dana Desa program tersebut dialokasikan untuk pembangunan Desa untuk infrastruktur seperti

pembangunan jalan, pembuatan paret kepersawahan pembuatan mesjid dan lain-lain”.

Adapun program pembangan Desa Beranang yang belum dilaksanakan masih banyak tetapi karena alokasi dana kurang cukup maka harus sabar dulu untuk sementara. Selanjudnya pada 17 february 2017 jam 8 saya mewawncarai Kepala Dusun Belah Toa “baik terima kasih yang saya tahu program tersebut sudah dilaksanakn beberapa seperti membagi bibit tebu untuk para petani, mebuca jalan ke kebun, tetapi ada juga yang belum terlaksana seperti pembutan jalan lingkar dan yang lain-lain”.

Selanjutnya pada 18 february 2017 jam 9 samapai dengan selesai saya mewawancarai Kepala Dusun Belah Uken Desa Beranang dia mengatakan bahwa “Baik program yang ada di Desa Bearanang untuk pembanguan Desa yaitu infrastruktur seperti pembanguan jalan kekebun, pembanguan air bersih. Sedangkan program yang belum dilaksanakan masih banyak seperti pembuatan jalan liangkar di Desa Beranang namun belum terlaksana karena masih menunggu anggaran”.

Selanjutnya pada tanggal 18 february 2017 jam 4 sampai selesai saya mewawncarai Kepala Dusun Belah Patung mengatakan bahwa “Terimakasih yang saya ketahui program tersebut yang ada di Desa Beranang cuaman saja infrastruktur seperti pembanguan jalan ke kebun, pembanguan air bersih dan lain-lain, sedangkan yang belum dilaksnakan ada lagi yang selalu direncanakan pembuatan jalan lingkar di Desa Beranang ini”.

Selanjutnya pada tanggal 19 februari 2017 jam 8 sampai dengan selesai saya mewawancarai Tokoh Agama dia mengatakan bahwa “Benar sejauh ini sudah dibangun infrastruktur di Desa Beranang ini seperti yang kita tahu bersama yaitu pembangunan jalan menuju kebun, pembangunan sekolah paud, pembangunan air bersih untuk warga desa, tetapi masih banyak lagi yang ada dalam rencana seperti pembangunan jalan lingkar pembukaan jalan kepersawahan, jalan kepersawah masih belum dibuka dikarenakan masyarakat masih ada yang belum setuju.

Selanjutnya pada 19 februari 2017 jam 2 sampai selesai saya mewawancarai Tokoh Adat menurut dia mengatakan bahwa “Infrastruktur yang sudah dibangun di Desa ini masih seperti jalan menuju kebun, air bersih, sekolah paud, jalan menuju pemakaman serta tempat berteduh dipemakaman, sedangkan yang masih dalam rencana seperti jalan lingkar dan jalan menuju sawah.

Selanjutnya 20 februari 2017 jam 10 sampai dengan selesai saya mewawancarai Tokoh masyarakat Desa Beranang dia mengatakan bahwa “Baik yang saya ketahui selaku masyarakat Desa Beranang mengetahui program tersebut ada yang namanya infrastruktur seperti pembangunan jalan ke kebun, pembangunan air bersih, sekolah paud, jalan ke pemakaman dan lain-lain. Sedangkan yang belum masih banyak, namun belum terwujud seperti harapan kami”. Selanjutnya 21 februari 2017 jam 8 sampai selesai saya mewawancarai salah satu masyarakat mengatakan bahwa “Baik yang saya ketahui program di Desa Beranang ini seperti pembangunan air bersih, pembangunan jalan menuju



kebun dan lain-lain. Sedangkan yang masih belum dilaksanakan seperti pembuatan jalan lingkar, pembangunan jalan kepersawahan”.

Selanjutnya 22 februari 2017 jam 9 sampai dengan selesai saya mewawancarai salah satu masyarakat Desa Beranang mengatakan bahwa “ Baik saya sebagai ibu rumah tangga dan masyarakat yang saya ketahui bahwa program yang ada seperti pembangunan jalan menuju kebun, pembangunan air bersih dan laian-lain. Sedangkan yang belum dilaksanakan masih banyak, mungkin menunggu anggaran dari pemerintah.

Selanjutnya 22 februari 2017 jam 11 sampai dengan selesai saya mewawancarai satu masyarakat mengatakan bahwa “Baik yang saya ketahuai program tersebut ada yang bersifat infrastruktur dan ada juga yang bersifat gotong-royong, kalau yang bersifat infrastruktur seperti pembanguan jalan menuju kebun, pembanguan sekolah paud dan lain-lain, sedangkan yang bersifat gtotong-royong seperti pemasangan paralon air bersih.

Selanjutnya pada 22 februari 2017 jam 2 sampai dengan selesai saya mewawancarai lagi masyarakat Desa Beranang mengatakan bahwa “Baik yang saya ketahui program yang ada di Desa Beranang ini sekarang ini yaitu pembanguan jalan, seadngakan yang belum dilaksnakan seperti pembanguan jalan lingkar dan pembanguan jalan kepersawahan”. Selanjudnya pada 22 februari 2017 jam 3 sampai dengan selesai saya mewawancarai masyarakat mengatakan bahwa “saya kurang tau juga tapi yang saya lihat ada sudah dibangaun seperti jalan menuju kebun, air bersih dan lain-lain.

Selanjutnya pada 23 februari 2017 jam 8 sampai selesai saya mewawancarai masyarakat mengatakan bahwa “Saya sering pergi kekebun yang saya tau jalan menuju kekebun sudah dibuat tapi seperti jalan lingkaran di Desa Beranang ini belum di buat sampai sekarang”.

### 3. Anggaran Dana Desa

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan kepala Desa Beranang pada 16 februari 2017 jam 8 sampai dengan selesai dia mengatakan bahwa “Alokasi dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara(APBN) seperti PNPM, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah(APBD) seperti DAK,DAU, dan dana bagi hasil, Bantuan pemerintah Aceh seperti BKPG dan sekarang ini bersumber dari Anggaran Dana Desa(ADD) berkisar 700-800 juta pertahun.

Selanjutnya pada 17 februaru 2017 jam 8 saya mewawancarai Kepala Dusun Belah Toa dia mengatakan bahwa “yang saya ketahuai dulu ada yang namanya PNPM, BKPG dan sekarang ini bersumber Anggaran Dana Desa(ADD) sebanyak 700-800 juta pertahun, “Selanjutnya pada 18 februari 2017 jam 9 samapai dengan selesai saya mewawancarai Kepala Dusun Belah Uken “yang saya tahu sekarang ini bersumber dari Anggaran Dana Desa berkisar 700-800 juta pertahun.”

Selanjutnya pada tanggal 18 februari 2017 jam 4 sampai selesai saya mewawancarai Kepala Dusun Belah Patung mengatakan bahwa “Yanag saya ketahuai betul sumber dana Desa bersala dari Anggaran Dana Desa(ADD) yang ditransfer langsung ke rekening Desa. “Selanjutnya pada tanggal 19 februari 2017

jam 8 sampai dengan selesai saya mewawancarai Tokoh Agama dia mengatakan bahwa “yang saya ketahui saat ini bersumber dari Anggaran Dana Desa(ADD).

Selanjutnya pada 19 februari 2017 jam 2 sampai selesai saya mewawancarai Tokoh Adat menurut dia mengatakan bahwa “ yang saya ketahui sumber dana bersumber dari Anggaran Dana Desa(ADD). Selanjutnya 20 februari 2017 jam 10 sampai dengan selesai saya mewawancarai Tokoh masyarakat Desa Beranang dia mengatakan bahwa “Iya benar sumber dana desa bersala dari Anggaran Dana Desa (ADD) karna kita pasti diberitahu.

Selanjutnya 21 februari 2017 jam 8 sampai selesai saya mewawancarai salah satu masyarakat mengatakan bahwa “Yang saya deangar pada sekarang ini bersumber dari Anggaran Dana Desa kalau mengenai jumlah saya kurang tahu.” Selanjutnya 22 februari 2017 jam 9 sampai dengan selesai saya mewawancarai salah satu masyarakat Desa Beranang mengatakan bahawa “ yang saya ketahui anggaran bersumber dari Anggaran Dana Dsa.”

Selanjutnya pada 22 februari 2017 jam 11 sampai dengan selesai saya mewawancarai lagi masyarakat Desa Beranang mengatakan bahwa. “ yang saya tahu sumber dana Desa berasal dari Anggaran Dana Desa mengenai jumlah saya kurang tahu.” Selanjutnya pada 22 februari 2017 jam 2 sampai dengan selesai saya mewawancarai lagi masyarakat Desa Beranang mengatakan bahwa “Baik yang saya ketahui saat ini dana di Dsa ini berasal dari Anggaran Dana Desa tapi kalau jumalah saya kuarang tahu”.

Selanjutnya pada 22 februari 2017 jam 3 sampai dengan selesai saya mewawancarai masyarakat mengatakab bahwa “Yang saya ketahui pada saat ini

yaitu bersumber dari Anggaran Dana Desa kalau mengenai jumlah saya tidak mengetahui”.Selanjutnya pada 23 februari 2017 jam 8 sampai selesai saya mewawancarai masyarakat mengatakan bahwa “kalau saya tidak salah sumber dana Desa berasal dari Anggaran Dana Desa.

#### 4. Pengambilan Keputusan

Berdasarkan wawancara saya dengan Kepala Desa Beranang pada tanggal 16 februari 2017 jam 8 sampai dengan selesai mengatakan bahwa “Memang dalam mengambil keputusan masyarakat tidak ikut namun dalam struktur organisasi Pemerintah Desa ada badan Pemusyawaratan Desa(BPD), Bendahara Desa dan beberapa tokoh seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan kepala Dusun maka orang inilah yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan”. Selanjutnya pada 17 februari 2017 jam 8 saya mewawancarai kepala Dusun Belah Toa dia mengatakan bahwa “Kalau masalah itu tidak pernah kecuali utusan seperti BPD, Aparatn Desa dan Tokoh-tokoh lainnya.”

Selanjutnya pada 18 februari 2017 jam 9 samapai dengan selesai saya mewawancarai Kepala Dusun Belah Uken Desa Beranang dia mengatakan bahwa “Tidak kecuali cuman saja seperti BPD, Aparat Desa dan Tokoh-tokoh lainnya”. Selanjutnya pada tanggal 18 februari 2017 jam 4 sampai selesai saya mewawancarai Kepala Dusun Belah Patung mengatakan bahwa “Yang saya ketahui tidak pernah kalau dalam penambilan keputusan cuman saja melalui musyawarah aparat Desa seperti BPD dan Tokoh-tokoh lainnya.

Selanjutnya pada tanggal 19 februari 2017 jam 8 sampai dengan selesai saya mewawancarai Tokoh Agama dia mengatakan bahwa “Yang saya ketahui

pernah kecuali aparat Desa, BPD dan tokoh-tokoh lainnya”. Selanjutnya pada 19 februari 2017 jam 2 sampai selesai saya mewawancarai Tokoh Adat menurut dia mengatakan bahwa “Yang saya ketahui karna saya juga ikut pengambilan keputusan tidak pernah ada cuman aparat Desa dan Tokoh-tokoh lainnya”.

Selanjutnya 20 februari 2017 jam 10 sampai dengan selesai saya mewawancarai Tokoh masyarakat Desa Beranang dia mengatakan bahwa “Yang saya ketahui karna saya juga tokoh masyarakat di Desa Beranang ini kalau dalam pengambilan keputusan tidak pernah dilibatkan kepada masyarakat namun adanya utusan atau adanya perwakilan dan aparat Desa yang menjadi wewenang dalam pengambilan keputusan”.

Selanjutnya 21 februari 2017 jam 8 samapai selesai saya mewawancari salah satu masyarakat mengatakan bahwa “Kalau masalah itu tidak pernah baik yang bersifat teknis maupun yang lainnya”. Selanjutnya 22 februari 2017 jam 9 sampai dengan selesai saya mewawancarai salah satu masyarakat Desa Beranang mengatakan bahwa “Tidak pernah kalau masalah itu yang kami ketahui nanti yaitu hasil kesimpulan keputusan tersebut yang bersifatb final”.

Selanjutnya pada 22 februari 2017 jam 11 sampai dengan selesai saya mewawancarai lagi masyarakat Desa Beranang mengatakan bahwa “Kami selaku masyarakat tidak pernah iku berperan dalam pengambilan keputusan tentang pembangunan di Desa ini”. Selanjutnya pada 22 februari 2017 jam 2 sampai dengan selesai saya mewawancarai lagi masyarakat Desa Beranang mengatakan bahwa “Masalah pengambialan keputsan kami tidak pernah ikut rapat”.

Selanjutnya pada 22 februari 2017 jam 3 sampai dengan selesai saya mewawancarai masyarakat mengatakab bahwa “Kalau maslah itu kami tidak pernah dilibatkan rapat dan tidak pernah diundangpun. Selanjutnya pada 23 februari 2017 jam 8 sampai selesai saya mewawancarai masyarakat mengatakan bahwa “Baik kalau masalah itu tidak pernah ikut rapat, biasanya itu di putusakan oleh pemerintah Desa ini”.

#### 5. Fator-fator Kendala Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Kepala Desa Beranang pada tanggal 16 februari 2017 jam 8 sampai dengan selesai mengatakan bahwa “Mungkin ini dugaan saya kendala mereka yakni, pembangunan Desa tanggung jawab aparat Desa, mereka tidak ada waktu, sibuk dengan pekerjaan masing-masing”. Selanjutnya pada 17 februaru 2017 jam 8 saya mewawncarai kepala Dusun Belah Toa dia mengatakan bahwa “Yang saya dengar masyarakat tidak dilibatkan dalam rapat, pengambialan keputusan rapat-rapat tertentu suapaya dalam mengambil keputusan bisa lebih kondusif”.

Selanjutnya pada 18 februari 2017 jam 9 samapai dengan selesai saya mewawancarai Kepala Dusun Belah Uken Desa Beranang dia mengatakan bahwa “Saya amati betul faktor tersebut anatara lain, informasi yang disamapaikan kadang kurang merata, keuangan dan lain-lain, waktu masyrakat lebih mementingkan urusan pribadi ketimbang ikut berpartisipasi, kesempatan bagi masyarakat untuk bekerja sama sangat sulit.

Selanjautnya pada tanggal 18 februari 2017 jam 4 sampai selesai saya mewawncarai Kepala Dusun Belah Patung mengatakan bahwa “Menurut saya ada

beberapa hal yang menjadi faktor kendala yaitu kesempatan bagi masyarakat kurang, kejujuran Aparat Desa kurang terbuka dan ada juga waktu masyarakat cuman saja kepentingan peribadinya lebih di utamakan.

Selanjutnya pada tanggal 19 februari 2017 jam 8 sampai dengan selesai saya mewawancarai Tokoh Agama dia mengatakan bahwa “Menurut saya adapun faktornya yaitu Pemerintah Desa yang kurang bijaksan dalam menekan masyarakat untuk berpartisipasi”.Selanjutnya pada 19 februari 2017 jam 2 sampai selesai saya mewawancarai Tokoh Adat menurut dia mengatakan bahwa “Menurut saya di karnakan pemerintah Desa yang kurang kerja sama dengan masyarakat”.

Selanjutnya 20 februari 2017 jam 10 sampai dengan selesai saya mewawancarai Tokoh masyarakat Desa Beranang dia mengatakan bahwa “Menurut saya ada beberapa yang harus dilakukan baik Pemerintah Desa maupun masyarakat namun pemerintah selaku pemegang kekuasaan harus bersikap lebih berperan, lebih bijaksana, lebih jujur lagi intinya sama-sama lebih memperbaiki lagi kedepannya”.

Selanjutnya 21 februari 2017 jam 8 samapai selesai saya mewawancarai salah satu masyarakat mengatakan bahwa “Baik menurut saya faktornya kenapa masyarakat kurang berpartisipasi di karnakan aparat Desa yang kurang kerja sama dengan masyarakat, sikap Aparat Desa dalam pengambilan keputusan berpihak”. Selanjutnya 22 februari 2017 jam 9 sampai dengan selesai saya mewawancarai salah satu masyarakat Desa Beranang mengatakan bahwa “Faktonya aparat Desa dan masyarakat tidak kompak, lebih mementingkan kegiatan masing-masing”.

Selanjutnya pada 22 februari 2017 jam 11 sampai dengan selesai saya mewawancarai lagi masyarakat Desa Beranang mengatakan bahwa “Faktanya seharusnya masyarakat yang sudah tau seharusnya mengingatkan aparat Desa untuk lebih bijaksan lagi, lebih terbuka lagi”. Selanjutnya pada 22 februari 2017 jam 2 sampai dengan selesai saya mewawancarai lagi masyarakat Desa Beranang mengatakan bahwa “Menurut saya faktornya di karenakan aparat desa yang masih bersifat mementingkan diri-sendiri.

Selanjutnya pada 22 februari 2017 jam 3 sampai dengan selesai saya mewawancarai masyarakat mengatakab bahwa “Menurut saya yang menjadi kendala yaitu, Pemerintah ataupun Aparat Desa tidak memberikan kesempatan bagi kami, kurangnya kerja sama antara masyakat dengan Aparat Desa”. Selanjutnya pada 23 februari 2017 jam 8 sampai selesai saya mewawancarai masyarakat mengatakan bahwa “Menuru saya yang menjai faktor utamanya yaitu kerja sama yang masih kurang anatara aparat Desa dengan masyarakat sehingga masyarakat lebih pentingkan usaha pribadi”.

#### 6. Tujuan Dari Pembangunan Desa.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Kepala Desa Beranang pada 16 februari 2017 jam 8 sampai denagan selesai mengatakan bahwa “Baik yang menjadi tujuan utama dari pembangunan Desa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat maka itulah langkah-langkah yang harus di tempuuh seperti infrastrutur, jalan, irigasi, air bersih, mesjid dan lain-lain”. Selanjudnya pada 17 februaru 2017 jam 8 saya mewawncarai kepala Dusun Belah Toa dia mengatakan bahwa “Tujuan utamanya yaitu untuk kesejahteraan bersama merubah dari yang primitif



kepada langkah-langkah yang modern seperti di bidang infrastruktur harus dimodrenisasikan dari yang sederhana ke yang lebih bagus”.

Selanjutnya pada 18 februari 2017 jam 9 samapai dengan selesai saya mewawancarai Kepala Dusun Belah Uken Desa Beranang dia mengatakan bahwa “Baik tujuan dari pembangunan Desa ini untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat oleh karna itu untuk mecapai kesejehtraan tersebut harus dilakukan pembangunan”. Selanjutnya pada tanggal 18 februari 2017 jam 4 sampai selesai saya mewawancarai Kepala Dusun Belah Patung mengatakan bahwa “Saya kira tujuan pembangunan di Desa ini untuk kesejahtraan bersama sekarang kita sudah lebih mudah untuk beraktifitas sudah bisa mengguanaka sepeda motor ke kebun”.

Selanjutnya pada tanggal 19 februari 2017 jam 8 sampai dengan selesai saya mewawancara Tokoh Agama dia menagatakan bahwa “Untuk kepentingan bersama supaya masyarakat bisa sejahtra itu saja menurut saya”.Selanjutnya pada 19 februari 2017 jam 2 sampai selesai saya mewawancarai Tokoh Adat menurut dia mengatakan bahwa “Menurut saya tujuannya untuk kebutuhan bersama yang bersifat umum sperti pembangunan jalan, air bersih dan lain-lain.

Selanjutnya 20 februari 2017 jam 10 sampai dengan selesai saya mewawancarai Tokoh masyarakat “Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa dan meningkatkan kesejahtraan umum maka harus disediakan fasilitas-fasilitas penunjang untuk meningkatkan kesejahtaraan masyarakat yaitu melalui infrastruktur”. Selanjutnya 21 februari 2017 jam 8 sampai selesai saya mewawancari salah satu masyarakat mengatakan bahwa “Baik menurut saya

sebagai masyarakat yakni untuk meningkatkan kesejahteraan umum yang bersifat menyeluruh”.

Selanjutnya 22 februari 2017 jam 9 sampai dengan selesai saya mewawancarai salah satu masyarakat Desa Beranang mengatakan bahwa “Menurut saya tidak lain yakni untuk memperbaiki atau meningkatkan Desa, didalam Desa terdapat masyarakat maka masyarakatlah yang menjadi tujuan pembangunan”. Selanjutnya pada 22 februari 2017 jam 11 sampai dengan selesai saya mewawancarai lagi masyarakat Desa Beranang mengatakan bahwa “Baik tujuan utama yaitu merubah keadaan suatu Desa seperti meningkatkan kesejhtraan masyarakat untuk memperoleh tersebut harus ditunjang dengan pembangunan infrastruktur”.

Selanjutnya pada 22 februari 2017 jam 2 sampai dengan selesai saya mewawancarai lagi masyarakat Desa Beranang mengatakan bahwa “Baik tujuan yang dibuat di Desa ini harus meberikan perubahan yang lebih baik,lebih positif, pembangunan yang dibuat di Desa ini harus untuk kesejahtraan bersama”. Selanjutnya pada 22 februari 2017 jam 3 sampai dengan selesai saya mewawancarai masyarakat mengatakan bahwa “Baik tujuan dari pembangunan Desa itu menurut saya merubah dari yang terbelakang menuju kearah yang lebih maju artinya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui infrastruktur”. Selanjutnya pada 23 februari 2017 jam 8 sampai selesai saya mewawancarai masyarakat mengatakan bahwa “Menurut saya tujuan dari pembanguan dan pemberian fasilitas yakni untuk mensejhtrakan masyarakat di Desa Beranang ini”.

## 7. Solusi

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Kepala Desa Beranang pada 16 februari 2017 jam 8 sampai dengan selesai mengatakan bahwa “Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membangun Desa yaitu masyarakat harus paham tanggung jawab dalam pembangunan Desa tanggung jawab kita semua”.Selanjutnya pada 17 februari 2017 jam 8 saya mewawancarai kepala Dusun Belah Toa dia mengatakan bahwa “Menurut saya solusinya masyarakat harus lebih diajak lagi untuk kerja sama dan tanggung jawab atas semua infrastruktur yang sudah dibangun karna kalau pemerintah Desa saja tidak akan pernah bisa apabila masyarakat tidak kompak”.

Selanjutnya pada 18 februari 2017 jam 9 sampai dengan selesai saya mewawancarai Kepala Dusun Belah Uken Desa Beranang dia mengatakan bahwa “Solusinya menurut saya memberikan kesempatan bagi masyarakat baik segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. “Selanjutnya pada tanggal 18 februari 2017 jam 4 sampai selesai saya mewawancarai Kepala Dusun Belah Patung mengatakan bahwa “Menurut saya bahwa memberikan ruang waktu kepada masyarakat untuk kegiatan apapun yang ada di Desa dan kejujuran aparat Desa”.

Selanjutnya pada tanggal 19 februari 2017 jam 8 sampai dengan selesai saya mewawancarai Tokoh Agama dia mengatakan bahwa “Sikap aparat Desa harus bekerja sama dengan masyarakat, sikap pemerintah Desa harus terbuka, sosialisai kepada masyarakat bahwa pembangunan Desa bukan saja tanggung pemerintah namun tanggung jawab bersama”.Selanjutnya pada 19 februari 2017

jam 2 sampai selesai saya mewawancarai Tokoh Adat menurut dia mengatakan bahwa “Harus transparan kepada masyarakat, harus jujur, sosialisasi kepada masyarakat bahwa tanggung jawab kita semua pembangunan di Desa ini”.

Selanjutnya 20 februari 2017 jam 10 sampai dengan selesai saya mewawancarai Tokoh masyarakat mengatakan bahwa “Menurut saya pemerintah Desa harus terbuka seluas-luasnya bagi masyarakat, pemerintah Desa harus mengajak masyarakat untuk sama-sama menjaga atas apa yang telah dibangun di Desa”. Selanjutnya 21 februari 2017 jam 8 samapai selesai saya mewawancari salah satu masyarakat mengatakan bahwa “Menurut saya solusinya yakni kejujuran, kerja sama keterbukaan”. Selanjutnya 22 februari 2017 jam 9 sampai dengan selesai saya mewawancarai salah satu masyarakat Desa Beranang mengatakan bahwa “Solusinya yang tepat yaitu harus transparan dan kejujuran aparat Desa.

Selanjutnya pada 22 februari 2017 jam 11 sampai dengan selesai saya mewawancarai lagi masyarakat Desa Beranang mengatakan bahwa “Harus terbuka bagi masyarakat, harus jujur kepada masyarakat dan saling kerja sama antara aparat Desa dan masyarakat”.Selanjutnya pada 22 februari 2017 jam 2 sampai dengan selesai saya mewawancarai lagi masyarakat Desa Beranang mengatakan bahwa “Kedepannya Pemerintah Desa harus lebih bijaksana lagi, lebih disiplin lagi dan lebih tepat waktu lagi dalam pembangunan Desa”.

Selanjutnya pada 22 februari 2017 jam 3 sampai dengan selesai saya mewawancarai masyarakat mengatakan bahwa “Kita masyarakat harus lebih kompak lagi kedpannya dan pemerintah Desapun harus lebih bijaksana

lagi”.Selanjutnya pada 23 february 2017 jam 8 sampai selesai saya mewawancarai masyarakat mengatakan bahwa “Menurut saya solusi yang tepat Pemerintah Desa pertama harus terbuka, pemerintah desa harus bijaksana supaya masyarakat mau lebih kompak lagi dalam berfartisipasi”.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Partisipasi dapat menjadi tujuan yang tepat untuk meningkatkan pembangunan Desa. Jika masyarakat memiliki keinginan atau pengorbanan maka partisipasilah wadah yang tepat untuk kepentingan bersama maka dari itu pemerintah Desa harus mampu memberikan yang terbaik terhadap masyarakat dan demikian juga masyarakatnya harus bisa bersatu demi kesejahteraan bersama, partisipasi merupakan komitmen yang kuat untuk memberikan harapan yang besar, pemerintah Desa harus memberi peluang yang baik kepada masyarakat demi meningkatnya partisipasi.

Partisipasi merupakan langkah awal yang harus ditingkatkan pemerintah terhadap masyarakat, maka pemerintah merupakan orang yang memegang kepentingan publik selayaknya mampu memberikan ruang dan waktu kepada masyarakat untuk berbagai macam kegiatan yang baik dari awal perencanaan sampai akhir perencanaan dan mentoring. Oleh karena itu pemerintah harus mampu bersinergi bersamaan dengan masyarakat demi mencapainya pembangunan di Daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Noor 32 Tahun 2004 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004 yaitu Daerah bisa mandiri tidak lagi berharap dari pusat sesuai dengan prinsip otonomi daerah.

## **B. Saran**

Meningkatkan pembangunan diperlukan berbagai pihak supaya suatu tujuan yang diharapkan bisa dicapai dengan baik. Maka dari itu pemerintah yang paling bereperan dalam mewujudkan harus mampu menggerakkan suatu budaya partisipasi agar kedepannya program-program yang disepakati bisa diwujudkan demi mencapainya kesejahteraan, ini merupakan tanggung jawab pemerintah merangkul seluruh elemen masyarakat dalam pengambilan keputusan yang akan dikehendaki baik pemerintah sebagai penggerak roda pemerintahan maupun masyarakat supaya apa yang telah diamanatkan oleh pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tercantum pada alenia keempat.

Disarankan pula kepada pihak swasta seperti pengusaha-pengusaha agar kedepannya lebih mengedepankan pengorbanan terhadap prinsip peksos yaitu untuk ikut peran serta dalam partisipasi, seperti yang kita sudah ketahui bersama bahwa partisipasi sangatlah penting untuk mencapainya kesejahteraan bersama, dan lagi supaya masyarakat bisa mandiri dan tahu betapa pentingnya keikutsertaan dalam partisipasi. Maka dari itu pemerintah harus selalau bijaksana dalam menangani dan mengawasi supaya masyarakat bisa kompak lagi dan terlatih akan kemandirian terutama untuk partisipasi demi kesejahteraan bersama, partisipasi harus biasa menjadi budaya yang kokoh dan kuat didalam pemerintah maupun masyarakat luas.

No.Resume	Nama	Kategorisasi	Kesimpulan
1	Zulkarnain	- Partisipasi masyarakat	- Di Desa Beranang Kecamatan Kutapanjang kedepannya harus lebih aktif dalam berpartisipasi mewujudkan pembangunan desa agar terciptanya kesejahteraan masyarakat.
2	Suhardir		
3	Karya	- perencanaan	
4	Ridwan		
5	Suhartono	- pembangunan	
6	Musa		
7	Hermansyah	- Sistem informasi	
8	Usman		
9	Saptiah	- sosialisasi	- Kebijakan pemerintah harus lebih ditingkatkan lagi untuk mengajak masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan.
10	H.Kamsah		
11	Salim	- Media	
12	Muhammad A		
13	Marzuki		- Partisipasi merupakan langkah awal yang harus di tingkatkan pemerintah terhadap masyarakat, maka pemerintah dalam hal ini yang menanggung kepentingan publik, memberikan ruang dan waktu kepada masyarakat dari awal perencanaan sampai akhir perencanaan dan mentoring.  - Partisipasi dapat menjadi tujuan yang tepat untuk meningkatkan pembangnan Desa maka dari itu masyarakat harus kompak dan mendukung apapun yang menjadi kebijakan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Dharmawan.A.H.2002, **Peningkatan Komunikasi Dan Perdesaan Berkelanjutan** Jurusan Ilmu Social Ekonomi Faperta IPB
- Ebida Arifuddin.1998.**Partisipasi Masyarakat Tani Pengguna Lahan Sawah Dalam Pembangunan Pertanian Di Desa Lombok Nusa Tenggara Barat.**Disertasi. Pascasarjana,IPB
- Eko, Sutoyo.2005 **Manifesto Pembaharuan Desa**, APMD Press Yogyakarta, Yogyakarta
- Gaboh, Fredriek Anderson.1998. **Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. Di Desa Pinili Kecamatan Dimembe Kabupaten Manahasa.**Tesis.Pascasarjana.IPB
- Herifa,Sj Sumarto,2003.**Inovasi Partisipasi Dan Good Governance.** Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Kamaudin, Ruslan. 1992 Bunga Rampai **Pembangunan Nasional Pembangunan Daerah.** Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.Jakarta
- Lugiarti, Eppy.2004.**Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Program Pengembangan Masyarakat.Di Komunitas Desa Cijayanti.** Tesis. Pascasarjana IPB
- Meolog.2006.**Metodologi Penelitian Kualitatif**,Bandung, Remaja Karya.
- Moeljarto,T.1987.**Politik Pembangunan, Sebuah Analisa Arah Dan Strategis.** Pt Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta
- Ndraha, Taliziduhu.1990 **Pembangunan Masyarakat.** Rineka Cipta Jakarta
- Nurman,2015 Strategi **Pembangunan Daerah.Rajawali Pers.** Depok.
- Raharjo, M Dawan, 2006. **Menuju Indonesia Sejahtera: Upaya Konkret Penegentasan Kemiskinan.** Jakarta: Khanata, Pustaka LP3ES Indonesia
- Sahidu, Arifudin,1998. **Partisipasi Masyarakat Tani Pengguna Lahan Sawah Dalam Pembangunan Pertanian. Di Daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat.** Disertasi.Pascasarjana,IPB
- Sumardjo Dan Saharuddin,2003.**Metode-Metode Partisipasi Dalam Pembangunan Masyarakat.** Jurusan Ilmu Social Ekonomi IPB

UU No 32 Tahun 2004 Lembaran Negara No 125 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 2004. **Perencanaan Pembangunan, Gunung Agung**, Jakarta.

Jogiyanto HM, **Analisa dan Desain Sistem Informasi**, Yogyakarta, (1999:11)

## DAFTAR WAWANCARA

Katagorisasi	Pertanyaan
1. Partisipasi masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Dalam melaksanakan pembanguann Desa dibidang infrastrukrut, gotong royong dan yang lainnya apakah masyarakat ikut berpartisipasi?</li><li>b. Bagaimana kekompakan masyarakat dalam berpartisipasi?</li><li>c. Bagaimana upaya kedepannya untuk masyarakat supaya mau ikut berpartisipasi?</li></ul>
2. Perencanaan.	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Langkah apa yang akan dilakukan untuk pembangunan desa ini?</li><li>b. Apakah masyarakat dilibatakan pembuatan perencanaan?</li><li>c. Sejauh ini apakah desa sudah memiliki perencanaan?</li></ul>
3. Pembangunan.	<ul style="list-style-type: none"><li>a. apa saja yang sudah dibangun di Desa Beranang ini ?</li><li>b. apakah pembangunan jalan di Desa ini sudah maksimal ?</li></ul>

